LAPORAN KINERJA (LKj) TRIBULAN III TAHUN 2025



BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. LUMAJANG

BABI

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja mengamanatkan bahwa pejabat Eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja Tribulanan kepada pejabat Eselon II. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode Tribulan. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai salah satu kelas jabatan pada Eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam periode Tribulan III Tahun 2025 merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam rangka mengidentifikasi hal-hal yang telah telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu hingga Tribulan III Tahun Anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET (Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemenuhan fasilitasi kebutuhan dan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%
2.	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kegiatan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	100%
		Angka Inflasi Daerah	5,51

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu hingga Tribulan III atau kurun waktu 1 Januari s.d 30 September 2025, dari 3 target Indikator Kinerja Program, kesemuanya telah ada pencapaian terhadap 3 target Indikator Kinerja baik itu pencapaian terhadap target Indikator Kinerja maupun Anggaran. Secara lengkap terhadap capaian kinerja Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel 2.2., sedangkan capaian realisasi anggaran yang dibandingkan dengan capaian kinerja tertuang dalam tabel 2.3. cost per outcome.

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2025 – Tribulan III

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemenuhan fasilitasi kebutuhan dan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	75 %	42,23 %	56,31%	
2	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kegiatan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	50 %	50 %	100%	
		Angka Inflasi Daerah	5,51	N/A	N/A	
			Capaian	Rata-rata	78,16%	

Tabel 2.3 Cost per outcome Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2025 - Tribulan III

No	DDOCD AM/KECIATAN	PROGRAM/KEGIATAN INDKATOR KINERJA		ANGGARAN			KINERJA			
NO	PROGRAM/REGIATAN	INDICATOR KINERJA	Р	R	C (%)	T	R	%	(%)	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6	
	Meningkatnya Pemenuhan fasilitasi kebutuhan dan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	1494.74.636,15	63.127.270	42,23%	75 %	42,23 %	73,33%	175%	
2	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kegiatan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	199.782.000	42.962.500	21,50%	50 %	50 %	100%	57,47%	
		Angka Inflasi Daerah	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
			349.256.636,15	106.089.770	30,38%			78,16%		

Pencapaian realisasi anggaran dan kinerja Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang dalam tabel diatas merupakan capaian penyerapan anggaran hingga Tribulan III Tahun Anggaran 2025 dan bukan merupakan pencapaian akhir tahun, dimana pencapaian masih relatif minim. Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja akhir tahunan.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran pada Tribulan III Tahun Anggaran 2025, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang terhadap upaya pencapaian 3 (tiga) target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Keterangan
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Mengikuti jadwal kegiatan yang ditentukan oleh OPD yang membidangi sehingga dapat terlaksana tepat waktu	Sesuai jadwal rutinitas
2	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Menjalankan aktivitas secara rutin sesuai waktu yang ditetapkan untuk masing-masing kegiatan yang bersifat rutinitas	Sesuai jadwal rutinitas
3	Angka Inflasi Daerah	Mengikuti jadwal kegiatan yang ditentukan oleh OPD yang membidangi sehingga dapat terlaksana tepat waktu	Sesuai jadwal rutinitas

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

- 1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan dihadapi yang dalam pencapaian target kinerja khususnya terhadap penyesuaian anggaran sehingga didapatkan solusi/jalan keluar atas hambatan dan kesulitas tersebut.
- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pencapaian indikator kinerja kegiatan, yang melibatkan/bergantung kepada pihak diluar Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

- 3. Melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertinggal dari perencanaan waktu pelaksanaan.
- 4. Proaktif terhadap staf/bawahan yang turut terlibat membantu dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan.
- 5. Aktif memantau progres kegiatan yang bersifat rutin.

2.5.	TANGO	GAPAN ATASAN LANGSUNG.
		Laporan sudah baik
		Laporan kurang baik
		Laporan segera diperbaiki
		Target dan realisasi diteliti ulang
		Capaian diteliti ulang
		Lain-lain

BAB II

PENUTUP

Laporan Kinerja KepalaBagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda

Kabupaten Lumajang periode Tribulan III Tahun Anggaran 2025 dapat disimpulkan

secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan

Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati

Lumajang Nomor 89 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, telah dapat dilaksanakan

sebagaimana mestinya meskipun belum optimal di dalam pelaksanaannya yang

tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 (tiga) target indikator kinerja

yang ditetapkan, telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja;

3. Perlu perbaikan dalam penyusunan target indikator dan waktu dalam pelaksanaan

program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya

Alam Setda Kabupaten Lumajang periode Tribulan III Tahun Anggaran 2025 yang

disusun dalam rangka akuntabilitas terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian

Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

Mengetahui,

Lumajang, 30 September 2025

Atasan Langsung

Asisten Perekonomian Dan Pembangunan

HAKI SUSIATI, SH.

Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

YUZHO HARIYANTO, AP., MT

NIP. 19750121 199412 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: YUDHO HARIYANTO, AP., MT.

Jabatan

: Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

:HARI SUSIATI, SH.

Jabatan

: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 1 September 2025

Pihak Pertama

NIP. 19670923 199302 2 001

Pihak Kedua

NIP. 19750121 199412 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN LUMAJANG

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(2)		
1.	Meningkatnya Pemenuhan fasilitasi kebutuhan dan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	
2.	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kegiatan perekonomian dan	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	100%	
	pembangunan	Angka Inflasi Daerah	5,51	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	16.742.000,00	
2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	2.916.000,00	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	53.388.054,15	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	46.428.582,00	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	30.000.000,00	
6.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp.	105.178.000,00	
7.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp.	94.604.000,00	
	JUMLAH	Rp.	349.256.636,15	

Lumajang, 1 September 2025

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang

> HARTSUSIATI, SH. NIP. 19670923 199302 2 001

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

YUDHO HARIYANTO, AP., MT.

NIP. 19750121 199412 1 001

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI (TRIBULAN - III) KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM TAHUN 2025

SASARAN	INDIKATOR		TAR	GET		PROGRAM/KEGIATAN	RE	EALISASI CAF	PAIAN KINE	RJA	Aktifitas yang direncanakan akan dilakukan untuk mencapai	REALISASI
0/10/110 II1	india (10)	TW1	TW2	TW3	TW4	THOSIGNIMAL SIMILAR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Target Kinerja	TET LIOTO
operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	20	15	25	30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20%	11%	25	-	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	63.127.270,00
Pemenuhan fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25	25	25	25	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25%	14,87%	25	-	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	7.597.850,00
_	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	25	25	25	25	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25%	8,33%	25	-	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	1.854.000,00
Pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	20	15	25	30	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20%	7,96%	25	-	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	14.582.805,00
Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25	25	25	25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	16,38%	25	-	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	29.827.420,00
,	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	25	25	25	25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	8,20%	25	-	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	9.265.195,00
fasilitasi kegiatan perekonomian	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	25	25	25	25	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	25	25	25	-	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	42.962.500,00
	Angka Inflasi Daerah				5,51					5,51		
6 Kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	Jumlah kebijakan perekonomian yang dihasilkan	-	-	-	3 Kebijakan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	-	-	Pengelola Data	27.122.000,00
7 Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam	Jumlah kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan	-	3 dokumen	-	3 dokumen	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	3 dokumen	<u>-</u>	-	Analis Penanaman Modal	15.840.500,00
JUMLA	Н											106.089.770,00

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN III TAHUN 2025 KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemenuhan fasilitasi kebutuhan dan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	75,00 %	42,23 %	56,31%	
2	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kegiatan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	50,00 %	50,00 %	100,00%	
		Angka Inflasi Daerah	5,51	N/A	N/A	

Capaian Rata-rata 78,16%

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.742.000	7.597.850	45,38%		
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.916.000	1.854.000	63,58%		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.388.054	14.582.805	27,31%	-175,09%	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.428.582	29.827.420	64,24%		
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000	9.265.195	30,88%		
6	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	105.178.000	27.122.000	25,79%	F7 470/	
7	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	94.604.000	15.840.500	16,74%	57,47%	
JUM	LAH	349.256.636	106.089.770	30,38%		
CAP	AIAN RATA RATA			39,13%	-58,81%	

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

Lumajang, 30 September 2025

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

ASISTEN
PEREKONOMIAN DAM PEMBANGUNAN

YUDHO HARIYANTO, AP., MT. NIP. 19750121 199412 1 001

H/RI SUSIATI, SH. NIP. 19670923 199302 2 001

NOTULEN RAPAT

Acara : Penerimaan Audiensi Pengurus Hiswana Migas Besuki dengan Bupati

Lumajang

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025

Waktu : 09.30 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Mahameru Bupati Lumajang

Pemimpin Rapat: Bupati Lumajang

Peserta: 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

3. Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP;

4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah;

7. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA;

8. SBM Rayon II PT. Pertamina Patra Niaga;

9. Pengurus Hiswana Migas Besuki.

Hasil:

- 1. Bahwa **Kuota Kabupaten Lumajang tahun 2025** Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) **Minyak Solar : 59.526 KL** dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) **Minyak Pertalite : 94.326 KL**, Selanjutnya di sampaikan bahwa Kuota tersebut merupakan gabungan kuota seluruh Konsumen Pengguna diwilayah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Mengingat Bahan Bakar Minyak tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak Subsidi dan Penugasan, maka diharapkan Hiswana Migas bisa sinergi dengan Pemerintah Daerah dan berperan aktif turut serta menjaga pendistribusian JBT dan JBKP anggotanya agar tepat sasaran dan tepat volume sehingga tidak melebihi kuota yang ditetapkan;
- 2. Berdasarkan hasil evaluasi kuota LPG Tabung 3 Kg per wilayah distribusi (kabupaten/kota) telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan pertumbuhan konsumsi LPG Tabung3 Kg, usulan Pemerintah Daerah, usulan Badan Usaha, pelaksanaan konversi BBM ke LPG bagi nelayan sasaran dan petani sasaran, serta pembangunan jaringan gas bumi, dengan hasil evaluasi Besaran Alokasi/Kuota LPG Tabung 3 Kg untuk Kabupaten Lumajang Tahun 2025 : 34.236 MT (Metrik Ton);
- 3. Realisasi Penyaluran BBM di Wilayah Kabupaten Lumajang s/d Juni Bio Solar 26.088 KL dan Pertalite 38.784 KL sehingga kalo di persenkan realisasi vs Kuota Bio Solar 43.8 % dan Pertalite 41.1 %.;
- 4. Realisasi Penyaluran LPG 3 Kg di wilayah Lumajang s/d Juni 2025 LPG 3 Kg PSO 16.000 sehingga kalo persentasikan realisasi vs kuota LPG 3 Kg PSO 46.6 %.;

5. Wajib diketahui bahwa pemberian kuota berdasarkan hari kerja kalender, sehingga dalam hari kerja kalender tanggal merah tidak termasuk pelaksanaan realisasi Kuota;

 Pemerintah Kabupaten Lumajang masih belum 100 % dalam penggunaan aplikasi XSTAR BPH Migas, masih terdapat 50 % Penerbitan Surat Rekomendasi melalui aplikasi Xstar

tersebut;

7. Pajak reklame SPBU untuk diberlakukan sama besarannya bagi SPBU di wilayah Kabupaten

Lumajang;

8. Pengambilan pajak Air Tanah diharapkan tidak satu bulan sekali, melainkan pengambilannya

dijadwalkan 6 bulan sekali;

9. Progres Permohonan Perizinan PBG dan SLF Gudang Agen LPG Ds. Sarikemuning Kec.

Senduro milik saudara Soepratikno pertanggal 22 Juni 2025 Timeline Tahap Perbaikan

Dokumen dan Status belum ada tindak lanjut dari pihak pemohon;

10. Progres Permohonan Perizinan PBG dan SLF SPBU PT. Dua Dewi Energi Ds. Melawang

Kec. Klakah milik saudara Soepratikno pertanggal 22 Juni 2025 Timeline Perbaikan

Dokumen Status Pemohon baru selesai melakukan perbaikan untuk dapat diverifikasi

kembali oleh Operator;

11. Progres Permohonan Perizinan PBG dan SLF SPBU PT. Amalia Fortuna Ds. Kepuharjo

Kec. Lumajang milik saudara Soepratikno pertanggal 22 Juni 2025 Timeline Perbaikan

Dokumen Status Lahan yang dimohon berada di kawasan LSD dan belum ada tidak lanjut

Kesimpulan/Saran:

1. Agar dibentuk Tim NJOP untuk melaksanakan pemutakhiran Data;

2. BPRD untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi masukan dari Pengurus Hiswana

Migas untuk Peningkatan PAD;

3. Bagian Perekonomian dan SDA agar segera menindaklanjuti belum maksimalnya OPD

terkait Pemberi Rekom menggunakan aplikasi XSTAR BPH Migas;

4. DPKP untuk menujuk PIC agar apa yang menjadi kekurangan pihak pemohon perizinan

PBG dan SLF tersampaikan dengan baik.

Pimpinan Rapat, BUPATI LUMAJANG

ttd

INDAH AMPERAWATI

2

Lampiran : Dokumentasi Audiensi Hiswana Migas Besuki dengan Bupati Lumajang bertempat di Ruang Rapat Mahameru Bupati Lumajang









Lampiran : Daftar Hadir Audiensi Hiswana Migas Besuki dengan Bupati Lumajang bertempat di Ruang Rapat Mahameru Bupati Lumajang

No		6 Lumajang is Hiswana Migas dengan ibu Bupati Lumajang Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan	Ket
1		Japatani mou	1 \	
2	MUSPUB	tadis/OPMPTSP	2 160	
3	ARIS PIDEKE	Kodu DPKP	3 10	
4	lin Suharyati	DIED	· Stappe	
5	Ungung	Insuope	5	
6	Yugho H	By leek romen	6 ft.	
7	Daday	Katil Distagratag	1 1	
В	Ammuddy	WK terswans might sound	B De	1
9	ZAMAL FLUO	HISMANDA	o fe	
10	Jokos Carryono	Herwang	10 9	
11	SOEPRATIGIO	76-	11 25	
12	HOUSE SUPURA	personna	12	7
13	TYMOTO	Pertann	13	
14	61905	BPED	14 946	1
15	Endah M	DPUTR-	15/1	7
15	APRIET BUDI S	Kondutah	16	de
17	7 11 101 0 11		17	
18			18	
19			19	
20			20	



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur 67316
Telepon (0334) 884146 - Faksimile (0334) 881887
Laman :lumajangkab.go.id Pos el : sekda.lumajang@gmail.com

Lumajang, 27 Agustus 2025

Nomor : 600.1.4.4/XX/427.14/2025

Sifat : Rahasia

Lampiran : -

Hal : Undangan

Yth. Daftar undangan terlampir

di

LUMAJANG

Dalam rangka mendasari dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, maka bersama ini dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari/tanggal : Kamis/28 Agustus 2025

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Terbatas Sekretaris Daerah

Acara : Rapat koordinasi penyelenggaraan Ijin Air Tanah

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Sekretaris Daerah,

Tembusan Yth.: AGUS TRIYONO

Bupati Lumajang (sebagai laporan)

Lampiran Surat

Nomor : 600.1.4.4/XX/427.14/2025

Tanggal : 27 Agustus 2025

Daftar Undangan:

Yth. 1. Asisten Administrasi

- 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- 4. Kepala BPRD
- 5. Kepala DPMPTSP
- 6. Kepala Dinas Pariwisata
- 7. Kepala Diskopindag
- 8. Kepala DPKP
- 9. Kepala DKPP
- 10. Kepala Dinas Kesehatan P2KP
- 11. Kepala Dinas Perikanan
- 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- 13. Kepala Bagian Kesra Setda
- 14. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda

DAFTAR HADIR

Hari

: Kamis

Tanggal Tempat

: 28 Agustus 2025 : Ruang Rapat Terbatas Sekretaris Daerah : Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ijin AirTanah Acara

NO	ŅAMA	DINAS/INSTANSI	P/L	TANDA TANGAN
1.	Paiman	Ada - Kerra	2	
2.	TRI RAHMAWATI	DPFP	P	Sh
3.	Fransiska Dwi s.	Diskan	P	7.
4.	Catur Prayogi	BPRD	1	
5.	DIDIK SUMBRIONU	DEMBLES	L	
6.	1500 Cugusto. p.	DEPP.		
7.	Sugary #	Kesra	L	2 86
8.	YULI HARIS	DLEPAR	P	
9.	IW AN Sulika	BLM		
10.	Youdho Hariyanh	By Perehononian		Id.
11.	ANDRI APRIAN	Dickopinag	6	Apr
12.	Marshall	Dinkes P2KK	1	
13.	Hani Surar.	Sildy	7	Atta-
14.	you medant	Ass 3	L	1 c.
15.	δ			
16.				
17.				
18.	- ~			
19.				
20.				





THE SECOND JELAJAH INFORMASI DAN BERITA

"DISTRIBUSI GAS MELON: SINERGITAS HISWANA MIGAS, PEMERINTAH DAN PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DALAM MENJAGA PASOKAN"

Bersama PT. Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas dan Bagian Perekonomian Kabupaten Lumajang



Yudho Hariyanto, AP., MT. (Kabag Perekonomian)



Hendra Saputra, SE. (SBM PT. Pertamina Patra Niaga)



<u>Joko Cahyono</u> (Sekretaris Hiswana Migas)

& FACEBOOK LPPL SUARA LUMAJANG ON AIR STUDIO 1 RADIO SUARA LUMAJANG

JUMAT, 26 SEPTEMBER 2025 08.00 - 09.00 WIB









JALUG Jember Pagi Ini



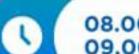
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN LUMAJANG



SOLIDARITAS MERAH PUTIH JAWA TIMUR







08.00 WIB -09.00 WIB



KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025

TOPIK:

"PEMERINTAH LUMAJANG DORONG PEREKONOMIAN MASYARAKAT"







Download di:

















PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur 67316

Faksimile (0334) 881887 Pos el : sekda.lumajang@gmail.com

LAPORAN

Kepada : Bupati Lumajang

Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Nomor : 000.1.5/8/427.14/2025

Perihal : Hasil Zoom Meeting TPID Kabupaten/Kota dengan Kemendagri

Pelaksanaan : Senin, 11 Agustus 2025

Tempat : Ruang Rapat Bagian Perekonomian dan SDA Setda

Berdasarkan Radiogram Kementerian Dalam Negeri RI nomor 500.2.3/4389/SJ tanggal 09 Agustus 2025 tentang Langkah Kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah tahun 2025, Percepatan Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi, evaluasi dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 juta rumah, Sosialisasi Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Pada Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Sertifikasi Halal, maka pada hari Senin 11 Agustus 2025 pukul 08.00 WIB s/d selesai dilaksanakan rapat koordinasi penanganan inflasi di Daerah yang diikuti oleh seluruh Kepala Daerah dan Anggota TPID baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan paparan Kepala BPS RI Pada Minggu I Agustus 2025 kenaikan IPH tertinggi di Pulau Jawa yaitu Kabupaten Probolinggo 2.86% yang dipengaruhi oleh komoditas beras dan bawang merah. Sedangkan Perubahan IPH periode Minggu I Agustus 2025 Kabuaten Lumajang mengalami deflasi yang sangat rendah sebesar 0,06%.
- 2. Himbauan Bappanas beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus Kepala Daerah di Kabupaten/Kota yaitu beras, minyak goreng merk minyakkita, bawang merah dan bawang putih. Pada minggu I Agustus 2025 harga Minyak Goreng merek Minyakkita dipasaran masih dijual diatas HET yaitu Rp 17.000/liter (HET Rp 15.700), sedangkan untuk beras Premium Rp 15.000 (HET Rp 14.900), sedangkan beras medium Rp 12.000 (HET Rp 12.500)
- 3. Sebagai tindaklanjut arahan Presiden dan Amanat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 600.5/3022/SJ dan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber pada Pemerintah Daerah, maka Kabupaten/Kota diminta untuk :
 - 1) segera membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), tim ini dibentuk untuk tujuan mengantisipasi serangan data nasional paling lambat tanggal 30 September 2025;

- 2) Penyediaan Sumberdaya Manusia (menyediakan SDM yang memiliki kompetensi dibidang teknologi informasi dan Persandian);
- 3) Penganggaran Operasional (menganggarkan biaya operasional TTIS dalam perencanaan pembangunan daerah APBD);
- 4) Registrasi TTIS (paling lambat tahun 2029);
- 5) Pembinaan dan Pengawasan (melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembentukan TTIS)
- 6) Laporan berkala (agar Kepala Daerah menugaskan Kepala Dinas Kominfo untuk berkoordinasi secara teknis dengan Badan Siber dan Sandi Negara terkait penyusunan TTIS)
- 4. Produk halal saat ini trennya meningkat dan banyak menjadi sasaran konsumen yang berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia merupakan Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar didunia, akan tetapi ironisnya banyak produsen bukan berasal dari Negara yang mayoritas muslim dimana produsen makanan halal banyak berasal dari Negara Brazil, tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan Australia. Oleh karena itu, dihimbau agar kita mengkonsumsi produk halal dalam negeri.
- 5. Mengamanati Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Nomor 100.4.4. 1/1627/SJ tentang pengelolaan RPH R/U, Kemendagri menegaskan komitmennya dalam memperkuat fasilitasi sertifikasi halal di tingkat dae rah sebagai bagian dari akselerasi program prioritas ekonomi syariah nasional. Oleh karena itu dihumbau agar Kepala Daerah dapat memberikan dukungan melalui fasilitasi kegiatan sertifikasi halal yang bersumber dari APBD Tahun 2025 antara lain:
 - 1) Pembiayaan Sertifikasi Halal bagi pelaku UMK melalui jalur regular dan *self* declare ;
 - 2) Fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal selain pembiayaan sebagaimana disebutkan pada huruf a, dapat dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis pendaftaran sertifikasi halal, pembinaan pemenuhan sistem jaminan produk halal atau kegiatan lainnya yang mendukung percepatan sertifikasi halal pelaku UMK; dan
 - 3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan jaminan produk halal.
- 6. Dalam rangka pecepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tanggal 11 Juli 2025 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, maka seluruh Kepala Daerah diminta untuk membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim dan Kepala Bappeda selaku Sekretaris serta anggota yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait, unsur Kejaksaan, Kepolisian, TNI, Bank Indonesia, dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang bertugas antara lain melakukan pemantauan, pengawalan, dan pelaporan atas percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Demikian untuk menjadi periksa dan proses lebih lanjut.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam,



<u>YUDHO HARIYANTO, AP., MT</u> NIP. 197501211994121001









PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur 67316
Telepon (0334) 884146 - Faksimile (0334) 881887
Laman :lumajangkab.go.id Pos el : sekda.lumajang@gmail.com

SURAT TUGAS

NOMOR: 800.1.11.1/6/427.14/2025

Dasar : Surat Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa

Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Managemen Strategis Nomor: S-106/KO.143/2025 Tanggal 12 Agustus 2025 Hal Permintaan Undangan Penandatanganan Nota Kesepahaman

Pengembangan Ekonomi Daerah;

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama : YUDHO HARIYANTO, AP, MT

NIP : 19750121 199412 1 001

Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

Sekretariat Daerah

Untuk : Melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan

Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 di Hotel Harris and Conventions Malang Jl. A. Yani Utara Riverside Blok C-1 Malang pada

hari Kamis 21 Agustus 2025.

Lumajang, 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH



AGUS TRIYONO

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Ι	Dasar	1	Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur Nomor S-106/KO.143/2025 tanggal 12 Agustus 2025 perihal Undangan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan Ekonomi Daerah.
II	Maksud dan Tujuan	:	Melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan Ekonomi Daerah
III	Waktu Pelaksanaan	:	21 Agustus 2025
IV	Nama Petugas	:	1. YUDHO HARIYANTO., AP, MT NIP. 1975121 199412 1 004 2. MOHAMAD IQBAL MAULANA NIP
٧	Tujuan	:	Hariss Hotel and Convention Hall JI A. Yani Utara Riverside Blo C-1 Malang
VI	Hasil		 Pada awal Tahun 2025 Kabupaten merupakah salah satu Kabupaten yang terpilih menjadi perwakilan Jawa Timur untuk mengikuri Program Peningkatan EKonomi Daerah yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan; Pada Program Peningkatan Ekonomi Daerah di Jawa Timur ini ada 3 (Tiga) Kabupaten yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Kabupaten Lumajang, Lamongan dan Kabupaten Blitar; Di Kabuaten Lumajang telah dilakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan beberapa pihak yang berkepentingan serta para petani dan Lembaga Jasa Keuangan untuk membahas peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan produksi dan hasil panen Pisang Mas Kirana dari pembudidayaan sampai dengan dukungan permodalan; Menindaklanjuti dari pertemuan yang dilakukan, maka Lembaga Jasa Keuangan yang ada di Kabupaten Lumajang sudah melaksanakan MoU dengan para peteni pisang mas kirana untuk support akses permodalan; Sebagai wujud komitmen bersama antara Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur dengan beberapa pemangku kepentingan yang ada di daerah terkait dengan peningkatan akses keuangan untuk mendukung pengembangan budidaya komoditas unggulan (Pisang Mas Kirana di Kabupaten Lumajang, melon di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Lamongan), maka diselenggarakan acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

VII	Saran/Tindak Lanjut	:	Setelah direalisasikan penandatanganan kesepahaman antara pemangku kepentingan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani pisang mas kirana di Kabupaten Lumajang

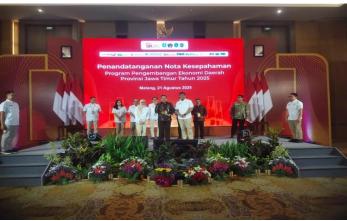
Lumajang, 23 Agustus 2025 Yang Melaporkan,

YUDHO HARIYANTO., AP, MT NIP. 1975121 199412 1 004

MOHAMAD IQBAL MAULANA NIP. -

DOKUMENTASI KEGIATAN









LAPORAN KINERJA (LKj) TRIBULAN III TAHUN 2025



BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. LUMAJANG

LAPORAN KINERJA (LKj) INDIVIDU TRIBULAN III TAHUN 2025

Jabatan Pelaksana : Penelaah Teknis Kebijakan

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. LUMAJANG

BABI

PENDAHULUAN

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sesuai dengan Pasal 10 (1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan pemantauan serta evaluasi terkait pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah perekonomian, dan sumber daya alam.

Adapun Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyediaan data, bahan dan/atau informasi yang berkaitan dengan pembinaan badan layanan umum daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian dan sumber daya alam;
- b. penyusunan rumusan atau petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari kebijakan pembinaan badan layanan umum daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian dan sumber daya alam;
- pengoordinasian rencana kegiatan operasional yang berkaitan dengan pembinaan badan layanan umum daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian dan sumber daya alam;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pembinaan badan layanan umum daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian dan sumber daya alam;
- e. pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bagian tugas dan fungsinya.

Sesuai amanat Lampiran II Peraturan Menteri PAN & RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan pada pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja maka berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja kepada atasan langsung.

Sebagai staf pelaksana dengan formasi jabatan pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

1

Pelaporan kinerja periode Tribulan III Tahun 2025 merupakan perwujudan sikap akuntabilitas sebagai Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam rangka mengidentifikasi hal-hal yang telah telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu hingga Tahun Anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Terdapat perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 atas penyesuaian nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai dengan PANRB No 11/2024 sehingga terdapat perubahan nomenklatur jabatan pelaksana Analis Penanaman Modal menjadi Penelaah Teknis Kebijakan. Oleh sebab itu terdapat Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Penelaah Teknis Kebijakan dengan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemenuhan fasilitasi kebutuhan dan	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%
		Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%
2.	Tersusunnya data kebijakan sumber daya alam	Jumlah dokumen data kebijakan sumber daya alam	6 dokumen
3.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 dokumen
	Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP dan Laporan (Laporan Semester)	2 kali
	,	Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP dan Laporan (Penyusunan RKP)	2 kali
		Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis OPD Pengelola	4 kali
		Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi penggunaan DBH CHT tingkat Propinsi	10 kali
		Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi penggunaan DBH CHT tingkat Pusat	1 kali
		Jumlah pelaksanaan Monev penggunaan dan realisasi DBH CHT	8 kali
		Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan tentang Penggunaan DBH CHT	1 kali

2.2. PENGUKURAN KINERJA

• CAPAIAN KINERJA Tribulan III

Dalam kurun waktu hingga Tahun 2025 (Tribulan III) atau kurun waktu 1 Januari s.d 30 September 2025, dari 14 target Indikator Kinerja, kesemuanya telah ada pencapaian terhadap

target Indikator Kinerja. Secara lengkap terhadap capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Capaian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tribulan III

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1.	Meningkatnya Pemenuhan fasilitasi kebutuhan dan	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75%	45,38%	60,51%
	operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	75%	27,31%	36,41%
		Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	75%	63,58%	84,77%
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	75%	64,24%	85,65%
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	75%	30,88%	41,17%
2.	Tersusunnya data kebijakan sumber daya alam	Jumlah dokumen data kebijakan sumber daya alam	- dokumen	- dokumen	-%
3.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	- dokumen	1 dokumen	-%
	Tenaga Kerja	Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP dan Laporan (Laporan Semester)	1 kali	1 kali	100%
		Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP dan Laporan (Penyusunan RKP)	1 kali	1 kali	100%
		Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis OPD Pengelola	1 kali	1 kali	100%
		Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi penggunaan DBH CHT tingkat Propinsi	3 kali	2 kali	66,67%
		Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi penggunaan DBH CHT tingkat Pusat	- kali	- kali	-
		Jumlah pelaksanaan Monev penggunaan dan realisasi DBH CHT	2 kali	2 kali	100%
		Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan tentang Penggunaan DBH CHT	- kali	- kali	-

PENYAJIAN DATA KINERJA

Laporan kinerja ini dibuat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas Pengukuran Kinerja Individu periode Tribulan III tahun 2025, dengan penyajian data kinerja berdasarkan dokumen pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Na		TARGET	REALISASI KIN	CADAIAN		
No.	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	Dokumen	Realisasi	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75%	Dokumen persentase realisasi anggaran	45,38%	60,51%	
	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	75%	Dokumen persentase realisasi anggaran	27,31%	36,41%	
	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	75%	Dokumen persentase realisasi anggaran	63,58%	84,77%	
	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	75%	Dokumen persentase realisasi anggaran	64,24%	85,65%	
	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	75%	Dokumen persentase realisasi anggaran	30,88%	41,17%	
2.	Jumlah dokumen data kebijakan sumber daya alam	- dokumen	Dokumen data kebijakan sumber daya alam (per Semester)	- dokumen	-%	
3.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	- dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	1 dokumen	-%	
	Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP dan Laporan (Laporan Semester)	1 kali	Dokumen pelaksanaan Asistensi RKP dan Laporan (Laporan Semester II tahun 2024)	1 kali	100%	
	Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP dan Laporan (Penyusunan RKP)	1 kali	Dokumen pelaksanaan Asistensi RKP dan Laporan (Penyusunan RKP Perubahan)	1 kali	100%	
	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis OPD Pengelola	1 kali	Dokumen pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis OPD Pengelola (per Tri Bulan)	1 kali	100%	
	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi penggunaan DBH CHT tingkat Propinsi	3 kali	Dokumen pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi penggunaan DBH CHT tingkat Propinsi	2 kali	66,67%	

Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi penggunaan DBH CHT tingkat Pusat	- kali	Dokumen pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi penggunaan DBH CHT tingkat Pusat (Tribulan IV)	- kali	-
Jumlah pelaksanaan Monev penggunaan dan realisasi DBH CHT	2 kali	Dokumen pelaksanaan Monev penggunaan dan realisasi DBH CHT (per Tribulan)	2 kali	100%
Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan tentang Penggunaan DBH CHT	- kali	Dokumen pelaksanaan Sosialisasi Peraturan tentang Penggunaan DBH CHT (pelaksanaan TB IV)	- kali	-

EFISIENSI KINERJA

Dalam pelaksanaan kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai staf pelaksana tidak terdapat beban anggaran dalam pelaksanaan kinerja, sehingga tidak terdapat penyajian efisiensi kinerja pada laporan kinerja tahun 2025.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang terhadap upaya pencapaian 14 (empat belas) target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut:

• ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja pada periode Tribulan III tahun 2025 sebagai berikut :

- 1. Dokumen perencanaan kinerja telah dibuat sesuai dengan Rencana Aksi atas capaian intervensi Rencana Hasil Kerja Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 2. Pelaksanaan kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan pelaksanaan kinerja individu.
- 3. Adanya pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kinerja individu dari atasan langsung.
- 4. Adanya kerjasama antar rekan kerja dalam pelaksanaan kinerja individu.

• ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja pada periode Tribulan III tahun 2025 sebagai berikut :

- 1. Ketidaksesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana waktu pengukuran kinerja individu yang telah dibuat.
- 2. Rencana penyesuaian anggaran berakibat pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan realisasi angaran
- 3. Adanya jenis pekerjaan diluar yang telah ditetapkan dalam pengukuran indikator kinerja individu.

• UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Adapun upaya/solusi keberhasilan capaian kinerja pada periode Tribulan III tahun 2025 sebagai berikut :

- Perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan rencana waktu pelaksanaan kegiatan yang menjadi indikator kinerja individu.
- 2. Koordinasi dan komunikasi intensif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian indikator kinerja individu.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

- Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja khususnya terhadap penyesuaian anggaran sehingga didapatkan solusi/jalan keluar atas hambatan dan kesulitan tersebut.
- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pencapaian indikator kinerja kegiatan, yang melibatkan/bergantung kepada pihak diluar Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 3. Melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertinggal dari perencanaan waktu pelaksanaan.
- 4. Proaktif terhadap rekan kerja dan turut terlibat membantu dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan.
- 5. Aktif melaksanakan kegiatan yang menjadi capaian dalam indikator kinerja individu.

2.5.	TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.				
		Laporan sudah baik			
		Laporan kurang baik			
		Laporan segera diperbaiki			
		Target dan realisasi diteliti ulang			
		Capaian diteliti ulang			
		Lain-lain			

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya

Alam Setda Kabupaten Lumajang periode Tribulan III Tahun Anggaran 2025 dapat

disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber

Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang

Nomor 89 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

meskipun belum optimal di dalam pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan waktu yang

telah direncanakan:

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 14 (empat belas) target indikator

kinerja yang ditetapkan, telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan

tetap memperhatikan kesesuaian capaian;

3. Perlu perbaikan dalam penyusunan target indikator dan waktu dalam pelaksanaan

program dan kegiatan yang dilaksanakan, melalui mekanisme p-Renja 2025.

Demikian Laporan Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan

Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang periode Tribulan III Tahun Anggaran 2025

yang disusun dalam rangka akuntabilitas terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian

Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 30 September 2025

Mengetahui, Atasan Langsung Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Dava Alam

.ŘI¥ANTO, AP<u>., MT.</u>

Penelaah Teknis Kebijakan

TAF ADHANIA, SP.

NIP. 19801015 201001 2 002

LAMPIRAN

- **❖** DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
- ❖ DOKUMENTASI KEGIATAN
- ❖ DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:LHERY SWARA OKTAF ADHANIA, SP.

Jabatan

: Penelaah Teknis Kebijakan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: YUDHO HARIYANTO, AP., MT.

Jabatan

:Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 19 Mei 2025

Pihak Pertama

Pihak Kedua

NIP. 19750121 199412 1 001

NIP. 19801015 201001 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 JABATAN PELAKSANA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN LUMAJANG

No.	STISTICAL REGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1) 1.	(2)	(3)		
1.	Meningkatnya Pemenuhan fasilitasi kebutuhan dan operasional perkantoran	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
	perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	
		Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	
	10 10 312	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	
2.	Tersusunnya data kakii 1	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	
	Tersusunnya data kebijakan sumber daya alam	Jumlah dokumen data kebijakan sumber daya alam	6 dokumen	
3.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman	Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Keria	2 dokumen	
	Modal, Tenaga Kerja	Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP dan Laporan (Laporan Semester)	2 kali	
		Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP dan Laporan (Penyusunan RKP)	2 kali	
		Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis OPD Pengelola	4 kali	
		Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi penggunaan DBH CHT tingkat Propinsi	10 kali	
		Jumian pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi penggunaan DBH CHT tingkat Pusat	1 kali	
		Jumlah pelaksanaan Monev penggunaan dan realisasi DBH CHT	8 kali	
		Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan tentang Penggunaan DBH CHT	1 kali	

Lumajang, 19 Mei 2025

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

<u>YUDHO HARIYANTO, AP., MT.</u> NIP. 19750121 199412 1 001 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

LHERY SWARA OKTAF ADHANIA, SP. NIP. 19801015 201001 2 002

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN III TAHUN 2025 JP - Penelaah Teknis Kebijakan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Pemenuhan fasilitasi kebutuhan dan operasional perkantoran	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75 %	30,51 %	40,68%		
		Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	75 %	18,98 %	25,31%		
		Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	75 %	55,62 %	74,16%		
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	75 %	47,86 %	63,81%		
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	75 %	22,68 %	30,24%		
2	Tersusunnya data kebijakan sumber daya alam	Jumlah dokumen data kebijakan sumber daya alam	- dokumen	- dokumen	0,00%	TB II dan TB IV	
3	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	- dokumen	- dokumen	0,00%	Semester I dan II	
		Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP dan Laporan (Laporan Semester)	1 kali	1 kali	100,00%	Semester I dan II	
		Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP dan Laporan (Penyusunan RKP)	1 kali	1 kali	100,00%	RKP Perubahan	
		Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis OPD Pengelola	1 kali	1 kali	100,00%	Rakor RKP Perubahan, dan Bidang Gakum	

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi penggunaan DBH CHT tingkat Propinsi	3 kali	2 kali	66,67%	Asistensi RKP Perubahan, Pembahasan Bidang Gakum 2025
		Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi penggunaan DBH CHT tingkat Pusat	- kali	- kali	0,00%	Tribulan IV
		Jumlah pelaksanaan Monev penggunaan dan realisasi DBH CHT		2 kali	100,00%	Monev Tribulan I, Monev 2024
		Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan tentang Penggunaan DBH CHT		- kali	0,00%	Tribulan IV
				Capaian Rata-rata	58,41%	

Mengetahui,

Lumajang, 30 September 2025

ATASAN LANGSUNG

KEPALA BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

YUDHO HARIYANTO, AP., MT. NIP. 19750121 199412 1 001 **Analis Penanaman Modal**

LHERY SWAR NOKTAF ADHANIA, SP. NIP. 1980 1015 201001 2 002

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI (TRIBULAN - III) JABATAN PELAKSANA - Penelaah Teknis Kebijakan TAHUN 2025

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN _	REALISASI CAPAIAN KINERJA				Aktifitas yang direncanakan akan dilakukan untuk mencapai	Status/Progres	Link dokumen
.		TW1	TW2	TW3	TW4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Target Kinerja	Pelaksanaan	pendukung
Pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	20%	15%	25%	30%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20%	11%	25%	-			
Pemenuhan fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25%	14,87%	25%	-	Terdapat perubahan jumlah anggaran pada proses pergeseran sebagai pelaksanaan inpres efisiensi	Progres	
Pemenuhan fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25%	8,33%	25%	-	Terdapat perubahan jumlah anggaran pada proses pergeseran sebagai pelaksanaan inpres efisiensi	Progres	
Pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	20%	15%	25%	30%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20%	7,96%	25%	-	Terdapat perubahan jumlah anggaran pada proses pergeseran sebagai pelaksanaan inpres efisiensi	Progres	
Pemenuhan fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	16,38%	25%	-	Terdapat perubahan jumlah anggaran pada proses pergeseran sebagai pelaksanaan inpres	Progres	
Pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	8,20%	25%	-	Terdapat perubahan jumlah anggaran pada proses pergeseran sebagai pelaksanaan inpres efisiensi	Progres	
Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kegiatan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	20%	25%	25%	-	Pelaksanaan sesuai dengan waktu yang direncanakan	Progres	
	Angka Inflasi Daerah				5,51					5,51			
Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam	Jumlah kebijakan Sumber Daya	-	3 dokumen	-		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	3 dokumen	-	-	Pelaksanaan sesuai dengan waktu yang direncanakan	Progres	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-	1 dokumen	-	1 dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-	1 dokumen	-	-	Pelaksanaan sesuai dengan waktu yang direncanakan	Progres	
	Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP dan Laporan (Laporan Semester)	-	1 kali	-	1 kali		-	1 kali	-	-	Pelaksanaan sesuai dengan waktu yang direncanakan	Progres	
	Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP dan Laporan (Penyusunan RKP)	-	1 kali	-	1 kali		1	1 kali	-	-	Pelaksanaan sesuai dengan waktu yang direncanakan	Progres	
	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis OPD Pengelola	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	1 kali	-	Pelaksanaan sesuai dengan waktu yang direncanakan	Progres	
	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi penggunaan DBH CHT tingkat Propinsi	3 kali	3 kali	3 kali	1 kali		3 kali	3 kali	3 kali	-	Pelaksanaan sesuai dengan waktu yang direncanakan		
	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi penggunaan DBH CHT tingkat Pusat				1 kali		-	-		-	Pelaksanaan sesuai dengan waktu yang direncanakan		
	Jumlah pelaksanaan Monev penggunaan dan realisasi DBH CHT	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		2 kali	2 kali	2 kali	-	Pelaksanaan sesuai dengan waktu yang direncanakan		
	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan tentang Penggunaan DBH CHT				1 kali		-	-		-	Pelaksanaan sesuai dengan waktu yang direncanakan	Progres	



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur 67316
Telepon (0334) 884146 - Faksimile (0334) 881887
Laman :lumajangkab.go.id Pos el : sekda.lumajang@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 094/ 020 /427.14/2025

Dasar

: Surat Kepala Dina Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur

Nomor: 500.10/3140/124.5/2025 Tanggal 8 Agustus 2025 Hal Undangan

Peserta Sosialisasi;

MEMERINTAHKAN

Kepada

Nama

LHERY SWARA OKTAF ADHANIA, SP, M.Si.

Pangkat/Golongan

: Penata Muda (III/a)

NIP

: 19801015 201001 2 002: Penelaah Teknis Kebijakan

Jabatan Unit Kerja

: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Setda Kab. Lumajang

Untuk

: Mengikuti Sosialisasi Perencanaan Energi Daerah dan Sistem Informasi Energi Baru Terbarukan (SIMBA) Untuk Mendukung Ketahanan Energi Jawa Timur bertempat di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Jl. Tidar No. 123 Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2025.

Lumajang, 26 Agustus 2025

An. Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ub

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG **SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Alun-alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur 67316
Telepon (0334) 884146 - Faksimile (0334) 881887 Laman :lumajangkab.go.id Pos el : sekda.lumajang@gmail.com

_embar ke	:			
Kode No.	:			
Nomor	:	094/	/427.14/202	.5

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	:	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
2.	Nama/NIP. Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas	:	LHERY SWARA OKTAF ADHANIA, SP., M.Si. 19801015 201001 2 002
3.	a. Pangkat dan Golonganb. Jabatanc. Instansi	:	a. Penata Muda (III/a)b. Penelaah Teknis Kebijakanc. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	Mengikuti Sosialisasi Perencanaan Energi Daerah dan Sistem Informasi Energi Baru Terbarukan (SIMBA) Untuk Mendukung Ketahanan Energi Jawa Timur bertempat di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Jl. Tidar No. 123 Surabaya
5.	Alat angkut yang dipergunakan	:	Kendaraan bermotor
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	:	a. Lumajang b. Surabaya
7.	a. Lamanya perjalanan dinasb. Tanggal berangkatc. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)		a. 1 (satu) harib. 27 Agustus 2025c. 27 Agustus 2025
8.	Pengikut : Nama		Pangkat/Golongan
	1. 2. 3.		englander de formatie Bowestern LEG-parya en daggere syste Historiae Commentier
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	:	a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdab. 5.1.02.04.01.0001
10.	Keterangan lain - lain	:	(1867-2-3 (1866-2-2) (1867-2-3 (1866-2-2) (1867-2-3 (1866-2-2) (1867-2-3 (1866-2-2) (1867-2-3 (1866-2-2) (1867-2-3 (1867-2-2) (1867-
			Dikeluarkan di : Lumajang

Tanggal

: 27 Agustus 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

	I. Berangkat dari : Lumajang Ke : Surabaya Pada tanggal : 27 Agustus 2025 Pejabat Pembuat Komitmen YUDHO HARIYANTO, AP, MT NIP. 19750121 199412 1 001
II. Tiba di : Surabaya Dari : Lumajang Pada tanggal : 27 Agustus 2025 Surveyor Pemetaan Ahli Muda LILIK RAHAYUMINGTYAS, ST. NIR 19760211 199901 2 001	Berangkat dari : Surabaya Ke : Lumajang Pada tanggal : 27 Agustus 2025 Surveyor Pemetaan Ahli Muda LILIK RAHAYONINGTYAS, ST. NIP 19760211 199901 2 001
III. Tiba di Dari :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
IV. Tiba di :	Berangkat dari :
V. Tiba di : Lumajang Dari : Surabaya Pada tanggal : 27 Agustus 2025 Pejabat Pembuat Komitmen YUDHO HARIYANTO, AP, MT NIP. 19750121 199412 1 001	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VI. Catatan Lain-lain	Topiffy mail may excerpable. He

VII. PERHATIAN:

PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

Pejabat Pembuat Komitmen

LAPORAN PERJALANAN DINAS

I Dasar

: Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Nomor : 500.10/3140/124.5/2025 Tanggal 8 Agustus 2025 Hal Undangan

Peserta Sosialisasi.

II Maksud dan Tujuan

: Mengikuti Sosialisasi Perencanaan Energi Daerah dan Sistem Informasi Energi Baru Terbarukan (SIMBA) Untuk Mendukung Ketahanan Energi

Jawa Timur

:

III Waktu Pelaksanaan

: 27 Agustus 2025

IV Nama Petugas

Nama

: LHERY SWARA OKTAF ADHANIA, SP., M.Si.

Jabatan

: Penelaah Teknis Kebijakan

V Tujuan

: Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

Jl. Tidar No. 123 Surabaya

VI Hasil

1. Pelaksaaan Sosialisasi Perencanaan Energi Daerah dan Sistem Informasi Energi Baru Terbarukan (SIMBA) Untuk Mendukung Ketahanan Energi Jawa Timur dipimpin dan dibuka oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur (Bapak Dr. Ir. Aris Mukiyono, MT. MM.). Perlu adanya inventarisasi digital segala potensi energi baru terbarukan di wilayah Provinsi Jawa Timur, serta sinergitas Program Pembangunan Energi sesuai dengan instruksi Presiden RI.

2. Materi diberikan oleh Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Kementerian ESDM yang menekankan pada Sinkronisasi & Digitalisasi Perencanaan Energi Pusat dan Daerah.

Disampaikan bahwa terdapat Kebijakan Energi Nasional yaitu Terciptanya Kedaulatan, Kemandirian dan Ketahanan Energi untuk mencapai Swasembada Energi, pemenuhan komitmen Indonesia dalam Dekarbonasi Sektor Energi untuk mewujudkan Ketahanan Iklim nasional dan mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau. Dengan adanya tantangan saat ini produksi minyak turun, impor minyak mentah & BBM jenis gasoline meningkat, pemanfaatan EBT yang masih rendah, LPG masih impor, ekspor batubara tertekan, infratstruktur gas dan listrik belum terintegrasi.

Program prioritas swasembada energi dalam RPJMN 2025-2029 dengan Sasaran Utama yaitu meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih dengan target :

Indikator	Target			
Indikator	2025	2029		
Indeks Ketahanan Energi	6,77	6,95		
Pasokan Energi Primer	312 MTOE	356,8 MTOE		
Konsumsi Energi Final per	0,750	0,830		
Kapita	TOE/kapita	TOE/kapita		
Porsi EBT dalam Bauran Energi	20%	23%		
Intensitas Energi Primer	147,7	137,6		
	SBM/Milyar	SBM/Milyar		
	rupiah	rupiah		

3. Materi diberikan oleh Sekretaris BAPPEDA Prov. Jawa Timur (Bapak Dr. Andhika P. Herlambang) yang menekankan pada Sinergi Pembangunan Energi Dalam Perencanaan Pembangunan.

Tema pembangunan yang diusung Provinsi Jawa Timur sinergi dengan Tema Pembangunan Nasional yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi. Termasuk bidang energi yang masuk dalam

Perencanaan Pembangunan RPJMD 2025-2029 dengan sasaran pembangunan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan Program Prioritas BERSERI (Bersih dengan Renewable Energy). Dan tertuang dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2019-2050 dengan indikator Bauran Energi target tahun 2025 sebesar 12,15%.

Terdapat upaya dukungan atas pemanfaatan Energi Baru Terbarukan berupa Pemasangan PLTS pada Pondok Pesantren, Pemasangan PLTS SHS (Solar Home System) pada rumah terpencil yang belum terdapat jaringan Listrik PLN, Pemasangan PLTS pada Gedung Instansi Pemerintah, Pemasangan PLTS pada Gedung Sekolah.

4. Pemaparan materi juga diberikan oleh Narasumber dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan aplikasi Sistem Informasi Energi Baru Terbarukan (SIMBA).

SIMBA merupakan aplikasi dalam rangka pengelolaan data energi daerah terkait dengan data spasial dan tabular untuk potensi panas bumi, air, bioenergi, surya, kuantitas, kualitas, neraca sumber daya, dan harga komoditas. Data energi daerah yang baik harus mengandung aspek mudah, murah, tepat, cepat, dan aktual, sehingga sebagai bahan kebijakan pengelolaan energi di Jawa Timur dan sebagai aplikasi pendukung pertumbuhan ekonomi.

Diberikan paparan dashboard SIMBA beserta link, usernam dan password masing-masing Kabupaten/Kota.

Terdapat beberapa saran dan masukan berkaitan dengan tampilan aplikasi SIMBA untuk memisahkan antara program energi subsidi dengan yang non subsidi.

No Username Password Kabupaten/Kota

KAB. LUMAJANG

3508 3508simba

Dokumentasi:







Lumajang, 27 Agustus 2025 Yang Melaporkan

LHERY SWARA OKTAF ADHANIA, SP., M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumaiang, Provinsi Jawa Timur 67316 Telepon (0334) 884146 - Faksimile (0334) 881887 Laman :lumajangkab.go.id Pos el : sekda.lumajang@gmail.com

SURAT TUGAS

NOMOR: 094/ 017 /427.14/2025

Dasar

Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Nomor : 560/1321/427.51/2025 Tanggal 21 Agustus 2025 Hal Undangan

Pembukaan Pelatihan:

MEMERINTAHKAN:

Kepada

: 1. Nama

: LHERY SWARA OKTAF ADHANIA, SP., M.Si.

Jabatan

: Penelaah Teknis Kebijakan

Instansi

: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya

Alam Setda Kab. Lumajang

2. Nama

: M. IQBAL MAULANA, S.Si.

Jabatan

: Staf

Instansi

: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya

Alam Setda Kab. Lumajang

Untuk

: Menghadiri acara Pembukaan Pelatihan Otomotif dalam rangka pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi bertempat di LPK Anugerah Desa Sukosari Kecamatan Kunir pada tanggal 25 Agustus 2025.

Lumajang, 25 Agustus 2025

An. Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber H KAB Daya Alam



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur 67316 Telepon (0334) 884146 - Faksimile (0334) 881887 Laman :lumajangkab.go.id Pos el : sekda.lumajang@gmail.com

> Lembar ke Kode No.

Nomor

: 094/017/427.14/2025

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	:		dinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, nutanan, Kelautan, dan Perikanan
2.	Nama/NIP. Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas	:		ERY SWARA OKTAF ADHANIA, SP.,M.Si. 301015 201001 2 002
3.	a. Pangkat dan Golonganb. Jabatanc. Instansi	:	a. b. c.	Penata Muda (III/a) Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	pela	nghadiri acara Pembukaan Pelatihan Otomotif dalam rangka aksanaan pelatihan berbasis kompetensi bertempat di LPk agerah Desa Sukosari Kecamatan Kunir
5.	Alat angkut yang dipergunakan	:	Ker	ndaraan bermotor
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	:	a. b.	Lumajang Kecamatan Kunir
7.	a. Lamanya perjalanan dinasb. Tanggal berangkatc. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)		a. b. c.	1 (satu) hari 25 Agustus 2025 25 Agustus 2025
8.	Pengikut : Nama		Par	ngkat/Golongan
	 MOHAMAD IQBAL MAULANA, S.Si 		Nor	n ASN
	3.			
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	:	a. b.	
10.	Keterangan lain - lain	:		

Dikeluarkan di

: Lumajang

Tanggal

: 25 Agustus 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

	I. Berangkat dari : Lumajang Ke : Kec. Kunir Pada tanggal : 25 Agustus 2025 Pejabat Pembuat Komitmen
II. Tiba di : Kec. Kunir Dari Pada tanggal : 25 Agustus 2025 Ketua LPK Anugrah LPK. ANUGERAH	YUDHO HARIYANTO, AP, MT NIP. 19750121 199412 1 001 Berangkat dari : Kec. Kunir Ke Pada tanggal PELAMUGERAH Ketua LPK Anugrah LPK. ANUGERAH
WIJEN LITOMO, S.Pd. III. Tiba di :	WIJEN UTOMO, S.Pd. Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
IV. Tiba di :	Berangkat dari :
V. Tiba di : Lumajang Dari : Kec. Kunir Pada tanggal : 25 Agustus 2025 Pejabat Pembuat Komitmen	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
YUDHO HARIYANTO, AP, MT NIP. 19750121 199412 1 001	TO THE SECRET OF
VI. Catatan Lain-lain	
VII. PERHATIAN:	all a tree tree grassores, and a

PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

Pejabat Pembuat Komitmen

LAPORAN PERJALANAN DINAS

I Dasar

: Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Nomor : 560/1321/427.51/2025 Tanggal 21 Agustus 2025 Hal Undangan Pembukaan Pelatihan.

II Maksud dan Tujuan

: Menghadiri acara Pembukaan Pelatihan Otomotif dalam rangka

pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi

III Waktu Pelaksanaan

: 25 Agustus 2025

IV Nama Petugas

Nama

: LHERY SWARA OKTAF ADHANIA, SP.,M.Si.

Jabatan

Penelaah Teknis KebijakanM. IQBAL MAULANA, S.Si.

Nama Jabatan

: Staf

V Tujuan

: LPK Anugerah Desa Sukosari Kecamatan Kunir

VI Hasil

- Pelaksaaan pelatihan otomotif yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang merupakan implementasi dari program pelatihan berbasis kompetensi yang bersumber dana DBH CHT Tahun Anggaran 2025.
 - 2. Pembukaan pelatihan otomotif dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perwakilan Kecamatan Kunir serta Perwakilan dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda.
 - 3. Pembukaan dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dengan menekankan pada keseriusan peserta pelatihan di dalam mengikuti setiap tahap dan materi pelatihan. Dan harapannya dapat memberikan bekal keterampilan bagi peserta pelatihan sehingga dapat diimplementasikan dalam memperoleh pendapatan.

Peserta pelatihan akan mendapatkan perlengkapan pelatihan dan diharapkan dapat bermanfaat dan pesan yang disampaikan untuk perlengkapan pelatihan berupa pompa angin, toolkit tidak dijual.

- 4. Pelatihan ini dilaksanakan bertempat di LPK Anugerah Desa Sukosari Kecamatan Kunir dengan sasaran pelatihan adalah pemuda-pemuda pencari kerja sebanyak 20 orang.
- Peserta melaksanakan pelatihan selama 20 hari dan pada akhir pelatihan peserta akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP bagi yang lulus uji kompetensi dan sertifikat kepesertaan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang.
 Uji kompetensi diberikan oleh asesor pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
- 6. Dalam pelaksanaan pelatihan otomotif ini masing-masing peserta mendapatkan perlengkapan pelatihan berupa pompa angin, toolkit, dan seminar kit pelatihan, dan secara simbolis diberikan kepada perwakilan peserta pelatihan.

Dokumentasi:







Lumajang, 25 Agustus 2025 Yang Melaporkan

LHERY SWARA OKTAF ADHANIA, SP., M.Si.

M. QBAL MAULANA, S.Si.

LAPORAN PERJALANAN DINAS

I Dasar : Kepala Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur nomor : 900.1.14.3/21067/021.3/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Bimbingan

Teknis Aplikasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Maksud dan Tujuan

Mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau

III Waktu Pelaksanaan

: 3 Juli 2025

Nama Petugas

Nama

: LHERY SWARA OKTAF ADHANIA, SP

Jabatan

: Penelaah Teknis Kebijakan

Tujuan

: Hotel Elmi Jl. Panglima Sudirman No. 42-44 Surabaya

VI Hasil

: 1. Pelaksanaan Bimtek Aplikasi DBHCHT diperuntukan bagi seluruh Perangkat Daerah yang mengelola DBH CHT pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

2. Bimtek Aplikasi DBHCHT dibuka oleh ibu Nurchayati selaku Koordinator Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian Propinsi Jawa Timur.

3. Pada pelaksanaan Bimtek diberikan *manual book* penggunaan aplikasi DBHCHT, disertai dengan praktek pengoperasian aplikasi secara langsung oleh seluruh peserta.

4. Dalam proses pengoperasian aplikasi secara langsung masih berupa trial eror aplikasi sehingga perlu penyempurnaan aplikasi.

5. Perangkat daerah di minta untuk melakukan uji coba dengan entri RKP DBH CHT Tahun 2025 pada aplikasi. Diberikan username dan

password akun masing-masing perangkat daerah.

6. Fitur pada aplikasi DBHCHT ini diharapkan sebagai media yang dapat mengakomodir kebutuhan administrasi termasuk record penyimpanan

dokumen pendukung.

7. Aplikasi ini diharapkan untuk segera dioptimalkan dalam pengisian RKP Murni dan Perubahan Tahun 2025, serta Laporan Realisasi Semester I Tahun 2025. Setiap OPD Pengelola secara mandiri untuk masing-masing melakukan entri melalui akun masing-masing.

8. Perangkat Daerah pengelola DBH CHT Kabupaten Lumajang berangkat bersama-sama dengan mendapatkan fasilitasi kendaraan transportasi dari anggaran Sekretariat DBH CHT

Perekonomian dan SDA).

Lumajang, 3 Juli 2025

ang Melaporkan

LHERY SWARA ONTAF ADHANIA, SP

DOKUMENTASI PELAKSANAAN BIMTEK APLIKASI DBH CHT TAHUN 2025 Hotel Elmi Surabaya, 3 Juli 2025









